

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
INTISARI	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	14
1. Tinjauan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	14
2. <i>Horizontal Policy</i> Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	28
3. Perspektif Persaingan Usaha dan Pengecualiannya Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	35

B. Tentang <i>Affirmative Action</i>	39
1. Tinjauan Umum <i>Affirmative Action</i>	39
2. Urgensi <i>Affirmative Action</i> Bagi Provinsi Papua	44
3. <i>Affirmative Action</i> Dalam Sistem Noken Sebagai Perbandingan	57
C. Pengaturan Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	63
1. Pengaturan Hukum Yang Baik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	63
2. Diskresi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	72
BAB III METODE PENELITIAN	77
A. Jenis dan Sifat Penelitian	77
B. Data Penelitian	78
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data	84
D. Analisis Data	84
E. Jalannya Penelitian	85
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	87
A. Pemaknaan Kebijakan <i>Affirmative Action</i> Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh Aparatur Pemerintah di Provinsi Papua	87
1. Sebelum Tahun 2014	90
2. Setelah Tahun 2014	94

B. Konsep Regulasi Sebagai Respon Pemaknaan Kebijakan	
<i>Affirmative Action</i> Dalam Pengadaan Barang/Jasa	
Pemerintah oleh Aparatur Pemerintah di Provinsi Papua	104
1. Urgensi Perubahan Regulasi Kebijakan <i>Affirmative</i>	
<i>Action</i> Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di	
Provinsi Papua.....	104
2. Konsep Ideal Regulasi Kebijakan <i>Affirmative Action</i>	
Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi	
Papua	111
BAB V PENUTUP	126
Kesimpulan	126
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN	138